

LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK



**STUDI EKSPLORASI KESIAPAN PENERAPAN
PERMENDIKNAS NOMOR 22 DAN 23 TAHUN 2006
DI MTs WAKHID HASYIM YOGYAKARTA**

Oleh:

1. Barkah Lestari, M.Pd. (Ketua)
2. Kiromim Baroroh, M.Pd. (Anggota)
3. Mustofa S.Pd (Anggota)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2008**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI

Alamat : kampus Karangmalang Yogyakarta 55281 Telp. 548202, 586168

PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1.	Judul Penelitian	:	Studi Eksplorasi Kesiapan Penerapan Permendiknas No 22 dan 23 Tahun 2006 Di MTs Wakhid Hasyim Yogyakarta
2.	Jenis Penelitian	:	Penelitian kelompok
3.	Kepala Proyek Penelitian	:	
	1. Nama Lengkap dan Gelar	:	Barkah Lestari, M.Pd
	2. NIP dan Golongan	:	130814608, IV/a
	3. Pangkat/Jabatan	:	Pembina, Lektor kepala
	4. Pengalaman di bidang penelitian	:	Lektor kepala
	5. Jurusan/Prodi	:	Pendidikan Ekonomi
	6. Fakultas	:	FISE
4.	Jumlah Tim Peneliti	:	3 (tiga)
5.	Lokasi Penelitian	:	MTs Wakhid Hasyim Yogyakarta
6.	Jangka Waktu Penelitian	:	5 bulan
7.	Biaya yang diperlukan (dengan huruf)	:	Tiga juta rupiah

Yogyakarta, 26 November 2008
Kepala Proyek Penelitian

Barkah Lestari, M.Pd.
NIP. 130814608

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ilmu Sosial UNY

Sardiman AM., M.Pd
NIP.130814615

Endang Mulyani, M.Si
NIP. 131405899

STUDI EKSPLORASI KESIAPAN PENERAPAN PERMENDIKNAS NOMOR 22 DAN 23 TAHUN 2006 di MTs WAKHID HASYIM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui tingkat kesiapan dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Wakhid Hasyim Yogyakarta. 2) Menemukan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di kesiapan dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Wakhid Hasyim Yogyakarta.

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah. Objek penelitian ini adalah kesiapan sekolah dalam implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang meliputi: kesiapan materiil dan nonmaterial. Bentuk kesiapan materiil atau sumber daya alamiah sekolah meliputi: perangkat kurikulum, sarana dan prasarana sekolah, keuangan, dan lingkungan sekolah yang mencakup lingkungan fisik (gedung) dan lingkungan sosial. Sedangkan bentuk kesiapan nonmaterial meliputi: kepemimpinan kepala sekolah, peran guru, siswa dan orang tua. Pengumpulan data yang utama dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.

Kesimpulan penelitian 1) Tingkat kesiapan dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Wakhid Hasyim Yogyakarta masih perlu ditingkatkan. 2) Faktor-faktor yang mendukung Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di kesiapan dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Wakhid Hasyim Yogyakarta adalah: a) Karena sekolah ini di bawah yayasan, maka dalam mendesain kurikulum lebih fleksibel. b) Potensi sekolah ini adalah guru-guru yang masih berusia muda (*fresh graduate*) sehingga lebih dapat menerima perubahan dan lebih kreatif. c) Lokasi sekolah yang strategis berada di dekat fasilitas pendidikan (perpustakaan, universitas) juga mendukung implementasi KTSP. Faktor penghambat dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Wakhid Hasyim Yogyakarta adalah: a) Belum siapnya guru dalam menyusun perangkat silabus dan RPP. b) Fasilitas laboratorium yang terbatas. c) Peran orang tua yang masih terbatas. d) Fasilitas ruangan yang belum memadai. e) Lingkungan sekolah yang bising. 6) peran dari komite sekolah kurang optimal.

Kata kunci: *Kesiapan, penerapan, permendiknas*

**STUDI EKSPLORASI KESIAPAN PENERAPAN
PERMENDIKNAS NOMOR 22 DAN 23 TAHUN 2006
DI MTs WAKHID HASYIM YOGYAKARTA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam lima tahun mendatang, pembangunan pendidikan nasional dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup: (i) pemerataan dan perluasan akses, (ii) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing (iii) penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, dan (iv) peningkatan pembiayaan. Dalam upaya meningkatkan kinerja pendidikan nasional, diperlukan suatu reformasi menyeluruh yang telah dimulai dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi pendidikan sebagai bagian dari reformasi politik pemerintahan. Reformasi politik pemerintahan ini tertuang di dalam UU No. 22/1999, yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut menandai perubahan radikal tata pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik, dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Pendidikan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan pendidikan yang menjadi wewenang pemerintah daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kinerja pendidikan nasional.

Permasalahan dalam kualitas pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling berpengaruh. Mutu keluaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses. Secara eksternal, komponen masukan pendidikan yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan meliputi: (1) ketersediaan pendidik dan tenaga

kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, maupun kesejahteraan pendidik yang belum memadai, (2) prasarana dan sarana belajar yang belum tersedia dan belum didayagunakan secara optimal, dan (3) pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran, serta (4) proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif.

Salah satu faktor yang terpenting dalam mempengaruhi kualitas pendidikan adalah ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan. Sampai dengan tahun 2002/2003 terdapat sekitar 2,7 juta guru dari jenjang pendidikan pra-sekolah hingga menengah, baik pada sekolah negeri maupun swasta. Namun jumlah tersebut belum memadai, karena itu masih diperlukan sekitar 400 ribu orang. Dalam kaitan dengan tenaga kependidikan, data Balitbang Depdiknas tahun 2003/2004 mengungkapkan bahwa pegawai administrasi di SD masih sangat kurang. Jumlah SD 135.644 sekolah hanya memiliki pegawai administrasi 7.687 orang, dan penjaga sekolah 100.486 orang. Dari 21.256 SMP, terdapat 15.636 perpustakaan baru memiliki 8.474 petugas perpustakaan, dari 14.900 laboratorium hanya tersedia 1.892 laboran. Pada 8.238 SMA dengan 5.598 perpustakaan baru memiliki 4.402 petugas perpustakaan, dari 10.050 laboratorium baru memiliki 1.555 laboran. Pada 5.115 SMK dengan 3.745 perpustakaan baru memiliki 2.017 petugas perpustakaan, dari 1.461 laboratorium baru memiliki 804 laboran. Tenaga kependidikan pada perpustakaan dan laboratorium sebagian besar belum memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai, sehingga mutu layanan pendidikan belum optimal.

Dari aspek fisik, kondisi prasarana dan sarana pendidikan belum sepenuhnya memadai. Hal ini, antara lain dapat dilihat dari ketersediaan perpustakaan di sekolah. Secara nasional, baru 27,6% SD yang sudah memiliki perpustakaan sekolah. Di samping itu, terjadi sebaran yang kurang merata menurut provinsi. Di Yogyakarta, misalnya, terdapat 72,8% SD yang

memiliki perpustakaan sedangkan di Maluku Utara hanya lima persen yang sudah memiliki perpustakaan sekolah.

Tabel 1.1
Kondisi Ruang Belajar, Tahun 2003

Jenjang Pend.	% Kondisi Ruang Belajar			Jumlah
	LP	RB	RR	
1. SD/MI	42,1	23,3	34,6	865.258
2. SMP/MTs	82,3	5,1	12,6	187.480
3. SMA/MA	92,3	2,0	5,6	78.412
4. SMK	92,0	3,0	5,0	97.290

Sumber: PDIP Balitbang Depdiknas, 2003
LP= Layak Pakai, RB=Rusak Berat, Dan RR=Rusak Ringan

Ruang belajar, dan sarana belajar lain seperti laboratorium, sarana olahraga yang rusak. Pada tabel 1.1, dari sekitar 865.258 ruang belajar (lokal) terdapat sekitar 500.818 lokal SD/MI (57,8%) yang rusak ringan dan rusak berat. Sementara pada jenjang SMP dari sekitar 187.480 ruang belajar terdapat 31.198 lokal SMP/MTs (17,7%) yang juga mengalami rusak ringan dan berat. Pada jenjang SM terdapat sekitar 13.777 lokal (15,6%) yang rusak ringan dan rusak berat.

Kondisi yang demikian, selain akan berpengaruh pada ketidaklayakan dan ketidaknyamanan pada proses belajar mengajar, juga akan berdampak pada keengganan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Fasilitas lainnya yang turut mempengaruhi mutu pendidikan ialah ketersediaan buku. Secara nasional, rata-rata rasio buku per siswa untuk SD, SMP, SMA, dan SMK adalah 0,80; 0,85; 0,65; dan 0,25. Masih jauh dari kondisi ideal rasio 1:1, satu siswa satu buku. Masalah yang lebih besar tidak hanya terletak pada ketersediaan buku tetapi juga dalam pendayagunaan buku pelajaran tersebut dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan. Kecenderungan sekolah

untuk mengganti buku setiap tahun ajaran baru semakin memberatkan orang tua siswa. Selain itu juga menimbulkan pemborosan yang tidak perlu, karena buku yang ada di sekolah tidak dapat dimanfaatkan oleh siswa tahun berikutnya. Pada SMP Terbuka, buku modul yang merupakan sumber belajar utama masih sangat kurang, sehingga mengganggu proses belajar mandiri. Kekurangan juga terjadi pada media penunjang yang lain, seperti laboratorium, ruang UKS, dan penunjang pembelajaran bahasa, terutama bahasa Inggris dan pendidikan jasmani dan kesehatan.

Keberhasilan implementasi penerapan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 banyak dipengaruhi oleh mutu kemampuan guru. Artinya, pada diri gurulah keberhasilan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dibebankan. Bagaimana realitanya di lapangan? Ada kesan umum, bahwa kemampuan guru dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 masih kurang memadai. Guru belum siap menghadapi berbagai perubahan, akses pada materi mutakhir terbatas, wawasan dan keterampilan pembelajaran juga terbatas. Motivasi dan kesiapan belajar siswa rendah. Kurangnya waktu belajar, lingkup materi yang sangat luas, serta perkembangan ilmu, teknologi dan seni yang sangat cepat. Keterbatasan media pembelajaran serta kemampuan memanfaatkan media yang kurang menyebabkan pembelajaran tidak efektif dan efisien.

Berdasarkan catatan *Human Development Index (HDI)*, menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia masih jauh dari memadai untuk melakukan perubahan yang sifatnya mendasar macam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari data statistik HDI terdapat 60% guru SD, 40% SLTP, SMA 43%, SMK 34% dianggap belum layak untuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu, 17,2% guru atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan bidang studinya. (Uus Toharudin, 2007).

Menurut Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, pasal 1

menyatakan bahwa: Satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan pada: (a). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 sampai dengan Pasal 38; (b). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27; (c). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; (d). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat menjadi urgen sekali apabila dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 ini kesiapan sekolah sudah benar-benar matang dan didukung oleh segenap komponen yang membentuk sekolah. Dalam rangka mengetahui tingkat kesiapan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 dan mengetahui faktor penghambat dan pendukungnya diperlukan studi eksplorasi tentang kesiapan sekolah tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat disusun perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Wakhid Hasyim Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Wakhid Hasyim Yogyakarta?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui tingkat kesiapan dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Wakhid Hasyim Yogyakarta.
- b. Menemukan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di kesiapan dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Wakhid Hasyim Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, terutama dalam bidang evaluasi pelaksanaan kebijakan kurikulum. Beberapa manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Perguruan Tinggi, terutama LPTK, dapat sebagai dasar dalam meningkatkan mutu output (calon guru) dengan membekali keterampilan dalam menyusun dan mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
- b. Bagi BSNP (badan Standar Nasional Pendidikan) dapat melakukan pemantauan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai input (masukan) bagi Perguruan Tinggi terutama LPTK dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan evaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan terutama penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Di samping itu dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 sehingga terjadi keselarasan program Perguruan Tinggi terutama LPTK dengan Depdiknas.

D. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam kajian penelitian ini ruang lingkungannya dibatasi pada kesiapan sekolah serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kurikulum. Pembatasan ini didasarkan atas pertimbangan pada langkah-langkah konkrit dalam memperkuat mutu pendidikan, yaitu: (1) memperkuat kurikulum dalam arti revisi yang menjamin relevansi, efisiensi, efektifitas dan produktifitas pembentukan kompetensi, (2) Memperkuat kapasitas manajemen sekolah melalui implementasi manajemen berbasis sekolah, dan (3) Memperkuat sumber daya tenaga kependidikan.

Selanjutnya ruang lingkup kajian dijabarkan ke dalam beberapa pokok bahasan yang mendukung tercapainya tujuan penelitian sesuai rumusan permasalahan di atas, yaitu meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingkat kesiapan dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Wakhid Hasyim Yogyakarta.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Wakhid Hasyim Yogyakarta.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kajian Teori

Dalam Pasal 2 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 dinyatakan bahwa:

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mulai tahun ajaran 2006/2007.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudah mulai menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah paling lambat tahun ajaran 2009/2010.
- (3) Satuan pendidikan dasar dan menengah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk semua tingkatan kelasnya mulai tahun ajaran 2006/2007.
- (4) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004, melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah secara bertahap dalam waktu paling lama 3 tahun, dengan tahapan :

- a. Untuk sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), dan sekolah dasar luar biasa (SDLB):
 - tahun I : kelas 1 dan 4;
 - tahun II : kelas 1,2,4, dan 5;
 - tahun III : kelas 1,2,3,4,5 dan 6.
- b. Untuk sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) :
 - tahun I : kelas 1;
 - tahun II : kelas 1 dan 2;
 - tahun III : kelas 1,2, dan 3.

Implementasi merupakan suatu penerapan ide konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Dalam *Oxford Advance Learner' Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah: “*put something into effect*”, (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).

Berdasarkan definisi implementasi tersebut, implementasi kurikulum didefinisikan sebagai suatu proses penerapan ide, konsep dan kebijakan kurikulum dalam suatu aktifitas pembelajaran, sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu, sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Implementasi kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran.

Menurut Miller dan Seller dalam Mulyasa (2002) bahwa: “*in some cases implementation has been identified with instruksion....*”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan konsep, ide, program atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau aktifitas-aktifitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Dikemukakannya juga bahwa implementasi kurikulum

merupakan proses interaksi antara fasilitator sebagai pengembang kurikulum, dan peserta didik sebagai subjek belajar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum adalah potensial konsep kurikulum yang masih bersifat potensial (tertulis) menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini Hasan yang dikutip Mulyasa (2002) mengungkapkan bahwa implementasi kurikulum Adalah hasil terjemahan guru terhadap kurikulum sebagai rencana tertulis yang sedikitnya dipengaruhi tiga faktor berikut:

- a. Karakteristik kurikulum; yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasan bagi pengguna di lapangan.
- b. Strategi implementasi; yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan.
- c. Karakteristik pengguna kurikulum, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum (*curriculum planning*) dalam pembelajaran.

Di sisi lain, Mars dalam Mulyasa (2002) mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah; dukungan rekan sejawat guru; dan dukungan internal yang datang dari dalam guru sendiri. Dari berbagai faktor tersebut guru merupakan faktor penentu di samping faktor-faktor lain. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah sangat ditentukan oleh guru, karena bagaimanapun baiknya sarana pendidikan apabila guru tidak melaksanakan tugas dengan baik, maka hasil implementasi kurikulum (pembelajaran) tidak akan memuaskan.

Secara garis besarnya implementasi kurikulum mencakup tiga kekuatan pokok, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi.

a. Pengembangan Program

Pengembangan kurikulum mencakup pengembangan program tahunan, program semester, program modul (pokok bahasan), program mingguan dan

harian, program pengayaan dan remedial, serta program bimbingan dan konseling.

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik.

c. Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi hasil belajar dalam implementasi kurikulum dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, *bench marking* dan penilaian program.

Untuk mengimplementasikan suatu program baru di sekolah tidak akan lepas dari kendala atau rintangan-rintangan. Oleh karena itu, untuk meminimalkan adanya kendala dalam proses implementasi tersebut perlu adanya persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh sekolah.

Menurut Sukmadinata dalam Muhammad Joko Susilo (2007), kendala tersebut ialah: (1) tidak adanya keseragaman, (2) tidak adanya standar penilaian yang sama, (3) sukar untuk melakukan pengelolaan dan penilaian secara nasional, (4) belum semua sekolah/distrik memiliki kesiapan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri.

Kendala tersebut dapat diatasi dengan lebih banyak melibatkan guru. Guru dilibatkan bukan dalam penjabaran kurikulum induk ke dalam program tahunan/catur wulan atau satuan pelajaran, tetapi juga untuk menyusun kurikulum menyeluruh di sekolahnya. Jika sejak awal guru dilibatkan dalam penyusunan kurikulum, mereka akan memahami benar substansi kurikulum dan cara implementasinya secara tetap.

Dalam rangka untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, maka sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses implementasi kurikulum perlu memikirkan dan berupaya untuk melakukan suatu tindakan-tindakan persiapan, berkenaan akan diterapkannya kurikulum satuan tingkat pendidikan. Ada dua hal

pokok yang perlu disiapkan pihak sekolah, yaitu mencakup kesiapan materiil dan nonmaterial. Kesiapan materiil dapat berupa kesiapan sekolah berkenaan dengan materi yang sifatnya kebendaan seperti perangkat kurikulum, sarana prasarana sekolah (laboratorium, ruang belajar, perpustakaan dan lain-lain), unsure keuangan, dan unsure lingkungan sekolah. Sedangkan kesiapan nonmaterial dapat berupa tenaga pendidikan yang handal dan professional (kepala sekolah/guru), kesiapan karyawan maupun kesiapan dari unsur kesiswaan dan orang tua siswa. Dan dalam dua hal inilah yang akan menjadi bahan kajian di dalam penelitian ini. Apakah pihak sekoalh sudah benar-benar melakukan persiapan baik materiil maupun nonmaterial berkenaan akan diberlakukannya kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut.

Bentuk kesiapan materiil sekolah dapat dilihat dari dimensi perangkat kurikulum, sarana dan prasarana sekolah, keuangan, dan lingkungan sekolah yang mencakup lingkungan fisik (gedung) dan lingkungan sosial.

a. Perangkat Kurikulum

Perangkat kurikulum merupakan sarana penunjang dalam pencapaian keberhasilan kegiatan pembelajaran yang harus dimiliki oleh seorang guru. Untuk itu setiap guru dituntut untuk menyiapkan dan memerencanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran secara optimal, maka guru harus melakuakn hal-hal sebagai berikut: 1) mengkaji dan memahami struktur program kurikulum yang berlaku, 2) memahami tujuan pengajaran, 3) mengkaji materi pelajaran, 4) mengkaji dan mengembangkan berbagai metode penagajaran yang tercantum dalam kurikulum, 5) mengetahui tata urutan penyajian dan alokasi waktu yang tersedia, 6) mengkaji dan mengembangkan sarana pembelajaran, 7) mengkaji dan mengembangkan cara penilaian proses hasil belajar, 8) mengembangkan kurikulum dalam tahunan, program cawu, dan persiapan mengajar, 9) memahami buku pedoman dan petunjuk pelaksanaan kurikulum, 10) memiliki buku referensi yang memadai, 11) mengembangkan dan memanfaatkan sumber belajar (Depdikbud, 1995).

Berkaitan dengan pengembangan kurikulum menjadi silabus yang lebih operasional dan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah, maka sistem pembelajaran harus harus mengarah pada pembelajaran yang berbasis kurikulum tingkat satuan pendidikan. Istilah silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Adapun langkah-langkah pengembangan silabus menurut Depdiknas (2002) dirinci menjadi delapan komponen, yaitu: 1) penentuan format dan sistematika silabus, 2) penentuan kemasan silabus, 3) penentuan format standar operasional pengembangan silabus, 4) penulisan identitas mata pelajaran, 5) penentuan kemampuan dasar, 6) penentuan materi pembelajaran dan uraiannya, 7) penentuan pengalaman belajar siswa, penentuan alokasi waktu, 8) penentuan sumber acuan.

b. Sarana dan Prasarana

Pengertian sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan yang dimaksud prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar.

Sarana dan prasarana pendidikan tersebut perlu dimanajemen dengan baik agar dapat memberikan kontribusi yang optimal pada jalannya proses pendidikan di sekolah. Mulyasa (2002) mengatakan bahwa manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif maupun kualitatif serta relevan dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik guru maupun peserta didik.

c. Keuangan

Chon (Fattah, 2000) mengatakan bahwa biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, sekolah maupun orang tua. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan siswa selama belajar. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 46 ayat (1) bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

4). Lingkungan

Dimensi lingkungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan fisik dan lingkungan social. Lingkungan fisik lebih cenderung dikaji dari sisi bangunan yang berada di sekitar sekolah, sedangkan lingkungan sosial dilihat dari kondisi masyarakat di sekitar sekolah. Baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial sama-sama memberikan kontribusi yang positif .

Bentuk kesiapan nonmaterial sekolah dapat dilihat dari dimensi kepemimpinan kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua. Fokus kajian yang dimunculkan hanya sebatas pada peran yang diberikan masing-masing dimensi dalam melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

a. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Tugas kepala sekolah adalah bertanggung jawab atas sekolahnya dalam melaksanakan berbagai kegiatan, seperti bagaimana mengelola berbagai masalah menyangkut pelaksanaan administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan maupun pendayagunaan sarana dan prasarana. Kaitannya dengan tugas dan fungsi kepala sekolah Permadi (1999) sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kepala sekolah mempunyai fungsi sebagai *educator* (guru), *manager* (pengarah, penggerak sumber daya), *administrator*, *supervisor* (pengawas, pengoreksi dan melakukan evaluasi).

b. Guru dan Karyawan

Berkaitan dengan peran guru, Hamalik (2003) peranan guru sebagai fasilitator belajar bertitik tolak dari tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Maka

guru berkewajiban mengembangkan tujuan-tujuan pendidikan menjadi rencana-rencana yang operasional. Dalam hal ini guru berperan dalam mengembangkan kurikulum dalam bentuk rencana-rencana yang lebih operasional seperti silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.

Kaitannya dengan implementasi kurikulum, maka guru perlu memerhatikan hal-hal berikut: (1) mengurangi metode ceramah, (2) memberikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik, (3) mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya, (4) bahan harus dimodifikasi dan diperkaya, (5) jangan ragu untuk berhubungan dengan spesialis bila ada peserta didik yang mempunyai kelainan, (6) gunakan prosedur yang bervariasi dalam membuat penilaian dan membuat laporan, (7) ingat bahwa peserta didik tidak berkembang dalam kecepatan yang sama, (8) usahakan mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap anak bekerja dengan kemampuannya masing-masing pada tiap pelajaran, (9) usahakan untuk melibatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan (Mulyasa, 2002).

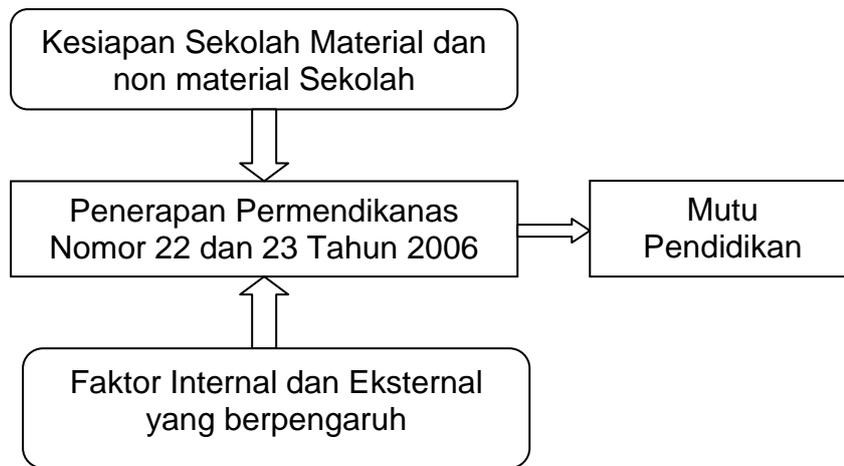
c. Siswa

Siswa merupakan bagian penting dari sekolah dan agar tidak terjadi keruwetan dalam melaksanakan kegiatan pengajaran, maka perlu diadakan penelaahan tentang siswa. Hal ini berkaitan dengan dasar pertimbangan dalam pengembangan suatu perencanaan pengajaran, seperti: menentukan jenis, luas dan bobot bahan pengajaran yang akan disajikan, cara penyampaian yang akan dilakukan dan kegiatan-kegiatan belajar lainnya (Hamalik, 2003).

d. Orang tua

Orang tua dapat dikatakan sebagai salah satu pihak yang ikut bertanggung jawab bagi kesuksesan program-program sekolah. Artinya, keberhasilan sekolah sangat ditentukan seberapa jauh tingkat partisipasi orang tua timplementasi program-program yang diselenggarakan sekolah. Ada korelasi antara kemajuan dan kualitas sekolah dengan tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan anaknya (Anik, 2003)

2. Kerangka Konseptual



BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Deskriptif karena mendeskripsikan secara mendalam tentang kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum dan berusaha menggali faktor-faktor yang mempengaruhinya (baik mendukung maupun menghambat).

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah. Objek penelitian ini adalah kesiapan sekolah dalam implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang meliputi: kesiapan materiil dan nonmaterial. Bentuk kesiapan materiil atau sumber daya alamiah sekolah meliputi: perangkat kurikulum, sarana dan prasarana sekolah, keuangan, dan lingkungan sekolah yang mencakup lingkungan fisik (gedung) dan lingkungan sosial. Sedangkan bentuk kesiapan nonmaterial meliputi: kepemimpinan kepala sekolah, peran guru, siswa dan orang tua.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Identifikasi sasaran melalui data di Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengetahui jumlah, alamat dan profil Madrasah Tsanawiyah (MTs) Wakhid Hasyim Yogyakarta. Bentuk kesiapan material atau sumber daya alamiah sekolah meliputi: perangkat kurikulum, sarana dan prasarana sekolah, keuangan, dan lingkungan sekolah yang mencakup lingkungan fisik (gedung) dan lingkungan sosial. Sedangkan bentuk kesiapan nonmaterial meliputi: kepemimpinan kepala sekolah, peran guru, siswa dan orang tua.

Pelaksanaan penelitian pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Wakhid Hasyim Yogyakarta dilaksanakan selama 3 bulan efektif yang dimulai bulan 5 yaitu Juni sampai dengan September 2008. Pengumpulan data yang utama dilakukan dengan cara wawancara dan observasi.

4 . Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Selain menggunakan deskriptif berupa angka (kuantitatif), penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

MTs Wahid Hasyim adalah lembaga pendidikan setingkat SMP yang berciri khas Islam, diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. MTs Wahid Hasyim berdiri pada tahun 1968. Pada awal berdirinya pada tahun 1978, lembaga ini bernama Pendidikan Guru Agama (PGA). Dan sejak tahun 1978 ia resmi beralih nama menjadi MTs Wahid Hasyim. Secara geografis, MTs Wahid Hasyim berada pada lokasi yang sangat strategis, mudah terjangkau oleh transportasi umum dan berdekatan dengan pusat-pusat pendidikan (UIN, UII, UGM, UNY, UPN, AMIKOM, AKPRIND, AMPTA, INSTIPER, STIE YKPN) serta pusat-pusat kebudayaan (Perpustakaan Bung Hatta, Musium Affandi, Musium Udara Adi Sucipto, Musium Benteng Vredeberg, Monumen Jogja Kembali, Candi Prambanan dan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat).

Sampai saat ini, siswa siswi MTs wahid Hasyim berasal dari berbagai ddaerah di penjuru nussantara (Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kalimantan, dan Sulawesi). Untuk hal ini, disediakan asrama tempat tinggal siswa agar proses pembelajaran dan pendidikan terlaksana secara terpadu.

B. Kesiapan Penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di MTs Wakhid Hasyim Yogyakarta

1. Kesiapan Materiil/Sumber Daya Alamiah Sekolah.

a. Perangkat kurikulum

Perangkat kurikulum yang tersedia antara lain:

- 1) Visi dan misi dan tujuan pendidikan
- 2) Mata pelajaran
- 3) Muatan local
- 4) Kegiatan pengembangan diri
- 5) Pengaturan beban belajar
- 6) Pedoman ketuntasan belajar
- 7) Pedoman kenaikan kelas dan penjurusan

- 8) Kalender akademik pendidikan
- 9) Jadwal mata pelajaran, muatan local dan pengembangan diri
- 10) Silabus
- 11) RPP
- 12) Perangkat Evaluasi Belajar (Proses, dan Hasil Belajar)

Visi

Menjadi wahana persemaian generasi muda Islam unggulan yang cerdas, terampil, berakhlakul karimah, berwawasan cosmopolitan, menghargai perbedaan serta keanekaragaman suku, bangsa dan agama.

Misi

1. Mengembangkan kecerdasan (integensi) anak didik yang meliputi kecerdasan inteektual, emosional, dan spiritual.
2. mengembangkan keterampilan anak didik sesuai dengan potensi, bakatan minatnya masing-masing dalam bidang seni, olahraga, dan teknologi (art, sport, daan teknologi).
3. Menanamkan dan mengembangkan akhlakul karimah anak didik dengan menerapkan norma-norma etik Islam dan etiket pergaulan sosial dalam tindakan nyata (in-action) sehari-hari
4. menanamkan kesadaran dan membuka cakrawala pandang anak didik sebagai bagian daari masyarakat dunia.
5. menanamkan ke dalam diri anak didik sikap toleransi (tasamuh) sebagai wujud penghargaan terhadap perbedaan dan keanekaragaman suku, bangsa dan agama .

Kurikulum

Kurikulum Depag mencakup mata pelajaran PAI (Pendidikan Agama islam), Aqidah akhlak, Qur'an Hadits, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam daan Bahasa Arab.

Kurikulum Depdiknas mencakup mata pelajaran umum: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA: Fisikan dan Biologi), Ilmu Pengetahuan sosial (IPS:Sejarah, Geografi, dan ekonomi), Mateatika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Kurikulum Pesantren mencakup mata pelajaran yang diarahkan kepada:

1. penguasaan kitab kuning (Nahwu-Jurumiyah dan 'Imrithi, Sharaf-Kailani dan Maqshud, Ta'limul Muta'alim, Fathul Qarib, Al-Akhlaq lil-Banin wal Banat, 'Idhatun Nasyi'in)
2. Penguasaan Al_Qur'an (Tajwid, Tahsinul Qira'ah, Tahfidzul Qur'an: Juz Amma dan 3 juz)
3. Penguasaan Bahasa Pergaulan Dunia (Bahasa Arab: Kitabah, Qira'ah, Istimah' dan Takallum; Bahasa Inggris: Writing, Reading, Listening, dan Speaking).
4. Penguasaan keterampilan komputer: MS Office (MS Word: Latin dan Arab, MS Excel, MS Acces, CorelDRAW dan Internet).

Tenaga Pengajar

MTs Wahid Hasyim dikelola oleh tenaga muda yang memiliki wawasan progresif dengan berprinsip : "Al-Muhafazhah 'ala al_Qadim ash-Shalih wa al-Akhdzu bi al-Jadid al-Ashlah" (Melestarikan Tradisi lama yang masih relevan dan mengadopsi unsur modern yang lebih relevan). Sebagian besar adalah sarjana S-1 Dalam bidangnya, dan beberapa sedang menempuh studi S2 dalam bidang: Manajemen Pendidikan (MP), Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP) dan Studi Islam. Para pengelola dan pengajar berupaya menerapkan metode pembelajaran yang merupakan paduan dari nilai-nilai etika yang terkandung dalam kitab Ta'limul Muta'allim dan model-model pembelajaran modern (Quantum Learning, Quantum Teaching, Active Learning, dan Accelerated Learning). Sementara perangkat yang belum ada adalah Panduan pemetaan potensi peserta didik .

b. Sarana dan prasarana sekolah

1) Buku pelajaran

Tabel IV. 1
Jumlah Buku Pelajaran di Perpustakaan MTs Wakhid Hasyim .

No	Buku Pelajaran	Jumlah
1	PKn	17
2	Pendidikan agama	213
3	Bahasa Indonesia	53
4	Bahasa Inggris	48
5	Pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan	2
6	Matematika	62
7	Biologi	20
8	Fisika	10
9	Sejarah	30
10	Seni Budaya	2
11	Teknologi informasi dan komunikasi	6
12	Keterampilan/Bahasa Asing	2
13	Muatan lokal	12
14	Pengembangan diri (BK, Ekstrakurikuler)	4
15	Ensiklopedi Islam	6
16	Kamus Besar bahasa Indonesia	2
17	Buku Agama Islam Umum	300
18	Buku Sastra	100
19	Buku Pengetahuan Ilmiah	70

Buku agama Islam masih mendominasi pemilikan perpustakaan dengan jumlah 300 eksemplar. Buku ini berasal dari Pusbuk dan Departemen Agama. Sementara untuk buku umum masih dirasakan kurang. Buku berasal dari dana BOS hanya untuk buku Bahasa Indonesia kelas 1 dan 2, Bahasa Inggris untuk 1 kelas, matematika untuk 1 kelas, dan IPA untuk 1 kelas.

2) Fasilitas ruang

Tabel IV.2
Fasilitas Ruang MTs Wakhid Hasyim

No	Ruang	Jumlah	Luas (m2)	Kondisi	Keterangan
1	Ruang kelas	3	210	baik	Milik
2	Ruang perpustakaan	1	16	Rusak ringan	milik
3	Ruang laboratorium komputer	1	15	Rusak ringan	Bukan milik
4	Ruang pimpinan	1	6	baik	milik
5	Ruang guru	1	12	baik	milik
6	Ruang tata usaha	1	16	baik	milik
7	Tempat ibadah	1	400	baik	Bukan milik
8	Ruang konseling	1	9	baik	Bukan milik
9	Ruang UKS	1	9	baik	Bukan milik
10	Tempat bermain/berolah raga	1	300	baik	milik

Sekolah ini belum memiliki fasilitas ruang laboratorium biologi, fisika, kimia, bahasa, IPS, ruang organisasi siswa, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan ruang multimedia.

Untuk jamban dan kamar mandi masih menggunakan fasilitas yayasan. Ruang perpustakaan masih menjadi satu dengan perpustakaan MA Wahid Hasyim namun disekat dengan triplek. Untuk tempat baca dilaksanakan dengan lesehan.

3) Alat/media pembelajaran

Tabel IV.3
Alat/media pembelajaran MTs Wakhid Hasyim

No	Fasilitas	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Komputer	3	baik	Milik
2	Papan tulis	3	Rusak ringan	milik
3	Meja	40	Rusak ringan	milik
4	kursi	80	Rusak ringan	milik

Sekolah belum memiliki fasilitas internet, LCD, OHP, Mikroskop dan peralatan lab.

- 4) Keuangan sekolah
Komponen keuangan sekolah meliputi:
- a) RAPBS
 - b) Sumber Dana Orang tua/peserta didik
 - c) Sumber dana pemerintah
 - d) Laporan pertanggungjawaban keuangan

Komponen keuangan sekolah yang tidak ada adalah:

- Sumber dana masyarakat
- Donatur lain
- Laporan keuangan sekolah

- 5) Lingkungan

Tabel IV.4
Suasana Lingkungan MTs Wakhid Hasyim

No	Lingkungan	Kondisi
1	Penataan ruang kelas	Tidak nyaman
2	Penataan bangunan	Tidak nyaman
3	Kebersihan ruang kelas	nyaman
4	Kebersihan lingkungan sekolah	nyaman
5	Kebisingan/keramaian	Tidak nyaman
6	Keamanan sekolah	nyaman
7	Hubungan sekolah dengan masyarakat	nyaman

Penataan ruang kelas dirasakan kurang nyaman karena bersebelahan dengan MI dan MA Wahid Hasyim. Sehingga kelas terkadang berubah sesuai dengan kebutuhan ukuran kelas. Kebisingan juga dirasakan karena sekolah ini berada dekat jalan nologaten yang merupakan jalur alternatif ke jalan gejayan, jl. Solo dan ringroad utara.

2. Kesiapan nonmaterial/sumber daya manusia sekolah

a. Kepemimpinan sekolah

- 1) Melaksanakan kegiatan pembelajaran

Setiap pagi mulai pukul 7.30 WIB kepala sekolah telah hadir di sekolah untuk mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran. Hal ini penting mengingat terkadang siswa masih bermalasan-malasan di

asrama sehingga perlu diberi teguran agar mereka segera berkemas ke sekolah. Terkadang kepala sekolah juga harus mengingatkan beberapa guru tentang jadwal pelajaran, karena ada beberapa guru yang masih berkuliah sehingga terkadang tidak bisa mengisi pembelajaran karena bentrok dengan jadwal kuliah.

2) Melaksanakan koordinasi/rapat rutin

Rapat rutin dengan para guru dilaksanakan sekurang-kurangnya satu bulan dalam sebulan. Rapat rutin dengan staff dilaksanakan minimal seminggu sekali

3) Melaksanakan pertemuan sekolah dengan orang tua

Pertemuan rutin dengan orang tua minimal dilaksanakan satu semester sekali, ketika pengambilan raport.

4) Mengupayakan kelengkapan administrasi sekolah

5) Melakukan supervisi (mengawasi, mengoreksi, dan melakukan evaluasi) kegiatan sekolah

6) Mendapatkan sosialisasi KTSP

7) Mendapatkan pelatihan penyusunan KTSP

8) Mampu menyusun dan mengembangkan KTSP

9) Memberikan kesempatan guru mengikuti sosialisasi dan pelatihan penyusunan/ pengembangan KTSP

b. Guru dan karyawan

1). Status dan Kualifikasi Guru

Tabel IV.5

Status dan Kualifikasi Guru MTs Wakhid Hasyim

No	Satatus Guru	Kualifikasi			Jumlah total
		<S1	S1	S2	
1	Guru PNS	-	1	-	1
2	Guru GT	-	1	-	1
3	Guru GTT	16	17	1	34
Jumlah		16	17	1	36

2). Kesiapan guru dalam Implementasi kurikulum

a. Melakanakn kegiatan pembelajaran

- b. Mengikuti koordinasi/rapat rutin sekolah
- c. Mengupayakan kelengkapan administrasi guru
- d. Mendapatkan sosialisasi penyusunan KTSP
- e. Mampu menyusun dan mengembangkan KTSP
- f. Membuat silabus
- g. Membuat RPP
- h. Menggunakan metode pembelajaran yang variatif

Adapun yang belum dilakukan guru adalah:

- a. melakukan pertemuan guru dengan orang tua
- b. mendapatkan pelatihan penyusunan KTSP
- c. Memberikan kesempatan guru mengikuti sosialisasi dan pelatihan penyusunan /pengembangan KTSP
- d. Menggunakan media/alat pembelajaran yang variatif

3). Status dan Kualifikasi Karyawan/pegawai

Tabel IV.6
Status dan Kualifikasi Karyawan/pegawai MTs Wakhid Hasyim

No	Status guru	Kualifikasi				Jumlah total
		SMA/K	Diploma	S1	S2	
1	Pegawai PNS	0	0	0	0	0
2	Pegawai tetap	0	0	0	0	0
3	Pegawai tidak tetap	3	1	5	1	10
	Jumlah	3	1	5	1	10

Semua karyawan di atas sekaligus merupakan guru. Hanya 1 pegawai perpustakaan yang tidak merangkap menjadi guru. Karena mayoritas pegawai juga guru, hal ini mengakibatkan pekerjaan Tata Usaha tidak dapat dilakukan secara maksimal.

4). Kegiatan karyawan

Kegiatan karyawan di sekolah meliputi:

- a. melaksanakan kewajiban sesuai tugasnya di sekolah
- b. mengikuti koordinasi/rapat rutin sekolah
- c. Membantu melaksanakan administrasi sekolah
- d. Mendapatkan sosialisasi penyusunan KTSP
- e. Mendapatkan pelatihan penyusunan KTSP

f. Mampu menyusun dan mengembangkan KTSP

c. Siswa

1) Populasi siswa

Tabel IV.7
Populasi siswa MTs Wakhid Hasyim

Kelas	Jumlah kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kelas 1	1	18	10	28
Kelas 2	1	17	13	30
Kelas 3	1	13	9	22
Jumlah	3	48	32	80

Siswa sudah mendapatkan sosialisasi tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Hal ini dilakukan guru melalui pembelajaran di kelas.

d. Orang tua

Saat ini siswa yang tinggal di asrama sebanyak 50 orang, dan yang diluar asrama 30 orang. Mereka yang diasrama jauh dari orang tua. Sehingga orang tua mendapatkan sosialisasi dari yayasan melalui telphon. Setiap tahun sekali diadakan rapat wali murid. Namun kepala sekolah mengakui ini kurang efektif karena hanya diwakilkan pada walinya tidak orang tua langsung.

Mengenai KTSP orang tua sudah mendapatkan sosialisasi dari sekolah. Hal ini dilakukan dalam berbagai kesempatan baik formal aupun non formal. Sosialisasi secara formal dilakukan ketika penerimaan raport, sementara sosialisasi nonformal dilakukan dengan orang tua yang berkunjung di asrama, disini pengurus mensosialisasikan sekaligus meminta saran dari orang tua.

C. Pembahasan

MTs Wahid Hasyim adalah lembaga pendidikan setingkat SMP yang berciri khas Islam, diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Karena sekolah ini di bawah yayasan, maka dalam mendesain kurikulum lebih fleksibel. Potensi sekolah ini adalah guru-guru yang masih berusia muda (*fresh graduate*) sehingga lebih dapat menerima perubahan dan lebih kreatif. Lokasi sekolah yang strategis berada di dekat fasilitas pendidikan juga mendukung implementasi KTSP.

Adapun hambatan sekolah dalam menerapkan KTSP adalah:

1. Belum siapnya guru dalam menyusun perangkat silabus dan RPP. Meskipun para guru sudah pernah mendapat sosialisasi tentang RPP dan silabus, namun belum ada satu bentuk kumpulan silabus dan RPP guru. Hal ini disebabkan berbagai keterbatasan antara lain belum pernah dilakukan workshop yang membahas tentang Silabus dan RPP.
2. Fasilitas laboratorium yang terbatas. Fasilitas laboratorium yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan KTSP ini. Pada beberapa mata pelajaran terutama IPA dan IPS belum ada laboratorium yang memadai, sehingga ini menghambat pelaksanaan KTSP
3. Peran orang tua yang masih terbatas. Selama ini peran orang tua masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan sebagian besar orang tua berada di luar kota sehingga tidak dapat mengawasi proses pembelajaran secara langsung. Masukan orang tua sangat membantu dalam implementasi KTSP.
4. Fasilitas ruangan yang belum memadai. Fasilitas berupa papan tulis, meja, kursi mengalami rusak ringan. Tentu ini sangat mengganggu kegiatan belajar.
5. Lingkungan sekolah yang bising. Lingkungan sekolah yang berada di pinggir jalan raya membuat kenyamanan kegiatan pembelajaran seringkali terganggu.
6. peran dari komite sekolah kurang optimal. Anggota komite sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua wali, dan dewan pakar. Orang tua wali dan dewan pakar adalah orang sibuk, sehingga koordinasi antara anggota komite kurang. Ini mengakibatkan kinerja komite sekolah kurang optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat kesiapan dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Wakhid Hasyim Yogyakarta masih perlu ditingkatkan.
2. Faktor-faktor yang mendukung Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di kesiapan dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Wakhid Hasyim Yogyakarta adalah: 1) Karena sekolah ini di bawah yayasan, maka dalam mendesain kurikulum lebih fleksibel. 2).Potensi sekolah ini adalah guru-guru yang masih berusia muda (*fresh graduate*) sehingga lebih dapat menerima perubahan dan lebih kreatif. 3) Lokasi sekolah yang strategis berada di dekat fasilitas pendidikan(perpustakaan, universitas) juga mendukung implementasi KTSP.
3. Penghambat dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di kesiapan dalam penerapan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Wakhid Hasyim Yogyakarta adalah: 1) Belum siapnya guru dalam menyusun perangkat silabus dan RPP. Meskipun para guru sudah pernah mendapat sosialisasi tentang RPP dan silabus, namun belum ada satu bentuk kumpulan silabus dan RPP guru. Hal ini disebabkan berbagai keterbatasan antara lain belum pernah dilakukan workshop yang membahas tentang Silabus dan RPP.2) Fasilitas laboratorium yang terbatas. Fasilitas laboratorium yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan KTSP ini. Pada beberapa mata pelajaran terutama IPA dan IPS belum ada laboratorium yang memadai, sehingga ini menghambat pelaksanaan KTSP 3). Peran orang tua yang masih terbatas. Selama ini peran orang tua masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan sebagian besar orang tua berada di luar kota sehingga tidak dapat mengawasi proses pembelajaran secara langsung. Masukan orang tua sangat membantu dalam implementasi KTSP. 4).

Fasilitas ruangan yang belum memadai. Fasilitas berupa papan tulis, meja, kursi mengalami rusak ringan. Tentu ini sangat mengganggu kegiatan belajar. 5). Lingkungan sekolah yang bising. Lingkungan sekolah yang berada di pinggir jalan raya membuat kenyamanan kegiatan pembelajaran seringkali terganggu. 6) peran dari komite sekolah kurang optimal

B. Saran

1. Perlu adanya workshop Silabus dan RPP. Hal ini diharapkan dapat memacu para guru untuk merancang silabus dan RPP.
2. Pembenahan sarana dan prasarana. Perlu kerja sama antara sekolah, yayasan, departemen agama dan dinas pendidikan .
3. peningkatan peran orang tua. Karena orang tua berada di luar kota, maka sebaiknya komunikasi via telpon ataupun surat lebih ditingkatkan agar terjalin komunikasi yang efektif antara sekolah dan orang tua siswa.
4. peningkatan peran komite sekolah

DAFTAR PUSTAKA

- Anik Gufron. (2003). *Implementasi Pendidikan Berbasis Kompetensi Bervisi Moral Bagi Sekolah, Peserta Didik dan Orang Tua*. Kedaulatan Rakyat tanggal 20 Mei 2003.
- Dadi Permadi, (1999). *Kepemimpinan Mandiri (Profesional) Kepala Sekolah*. Bantung: PT Sarana Panca Karya.
- Depdiknas, (2002). *Pola Induk Pengembangan Silabus Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Umum (SMU)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- E. Mulyasa, (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implikasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- _____, (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implikasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- _____, (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Joko Susilo. (2007), *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nanang Fatah. (2000). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Oemar Hamalik, (2003). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006
- Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006
- Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003